

# **Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah**

**Dr. Sukhem, S.E., M.Sc.**



Penerbit Jivaloka

## **UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta**

### **Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# **Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah**

**Dr. Sukhemi, S.E., M.Sc.**



Penerbit Jivaloka

**Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah**

©Jivaloka, 2025

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

All Right Reserved

Penulis

**Dr. Sukhemi, S.E., M.Sc.**

Editor

**Ahmad Jauhari**

Cover/Layout

Setia S Putra

Cetakan : I, Oktober 2025

viii+ 99 hlm; 15,5 x 23 cm

200-jivaloka-publishing

**ISBN** : 978- 634-7301-32-1

**E-ISBN** : 978- 634-7301-33-8

**QRCBN** : 62- 3198-9407-255

**Diterbitkan Oleh:**



Penerbit Jivaloka Mahacipta:

“Kreativitas Tanpa Batas”

Kadipolo RT/RW 03/35. Dsn. Sendangtirto,  
Kec. Berbah, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta. 55573

WhatsApp : +6281-7410-0434

Website : [www.jivaloka.com](http://www.jivaloka.com)

Facebook : @jivalokapublishing

Instalgram : jivaloka\_publishing

---

**Hak cipta dilindungi undang-undang**

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun,  
termasuk foto copy, tanpa izin tertulis dari penulis

Isi bukan tanggung jawab percetakan

## **KATA PENGANTAR**

Di era teknologi informasi saat ini, upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah menjadi urgensi dan relevan. Kemajuan teknologi bukan hanya membuka peluang efisiensi dan akurasi, melainkan juga menciptakan tuntutan baru bagi pemerintah untuk menjalankan prinsip-prinsip tata kelola transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi memungkinkan masyarakat aktif memantau penggunaan keuangan daerah, membuka ruang partisipasi publik, serta mengurangi asimetri informasi sebagai pangkal dari praktik penyimpangan. Sedangkan, akuntabilitas menuntut pemerintah daerah bukan hanya sekadar melaporkan penggunaan anggaran, tetapi juga perlu menunjukkan alokasi tersebut telah memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

Buku ini menemukan bahwa dua faktor utama, yaitu penyajian neraca daerah yang komprehensif dan aksesibilitas laporan keuangan yang mudah dijangkau, berpengaruh signifikan dalam meningkatkan tingkat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Neraca daerah yang disajikan secara jelas dan terstruktur memungkinkan pemangku kepentingan memahami kondisi keuangan pemerintah secara utuh, sementara aksesibilitas memastikan bahwa informasi tersebut dapat diperoleh tanpa hambatan teknis maupun administratif. Meskipun temuan ini juga menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan (*disclosure level*) secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan transparansi, hal ini justru menggarisbawahi kompleksitas dalam praktik pengungkapan informasi keuangan daerah.

Namun, yang patut dicatat adalah bahwa sinergi antara ketiga elemen tersebut—penyajian neraca, aksesibilitas, dan tingkat pengungkapan—dalam suatu sistem yang terintegrasi, mampu menciptakan kondisi yang memenuhi kriteria transparan dan akuntabel secara holistik.

Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas bukan hanya menjadi prinsip normatif, melainkan juga merupakan kata kunci yang menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Pemerintah yang mampu mengelola keuangan dengan transparan dan akuntabel, bukan hanya mematuhi regulasi, tetapi juga membangun fondasi *governance* yang inklusif dan partisipatif. Buku ini hadir sebagai referensi komprehensif dan berbasis *evidence-based* bagi para pengelola keuangan pemerintah daerah, akademisi, serta masyarakat luas yang memiliki ketertarikan mendalamai lebih lanjut perihal strategi dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Yogyakarta, September 2025

Penulis

# **DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel .....	4
C. Perihal Proses Kajian.....	6
D. Tentang Pembahasan Isi Buku .....	15
<b>BAB II <i>GOOD GOVERNANCE, AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH, PENYAJIAN NERACA, AKSESIBILITAS, DAN TINGKAT PENGUNGKAPAN</i> .....</b>	<b>16</b>
A. Good Governance, Akuntabilitas, dan Transparansi .....	17
B. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Penyajian Neraca .....	24
C. Aksesibilitas dan Tingkat Pengungkapan .....	26
<b>BAB III MENGKAJI BERAGAM VARIABEL AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH .....</b>	<b>33</b>
A. <i>Snapshot</i> Responden Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	33
B. Validitas Analisis Faktor dan Reliabilitas Cronbach's Alpha .....	35
C. Statistik Deskriptif Variabel Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Daerah .....	37

<b>BAB IV AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN <i>GOOD GOVERNANCE</i>.....</b>	<b>40</b>
A. Multikolinieritas, Heteroskedastisitas, dan Autokorelasi .....	41
B. Beragam Postulat Mengenai Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Daerah.....	46
C. Pertautan Neraca Daerah, Aksesibilitas, dan Tingkat Pengungkapan .....	51
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
A. Kesimpulan .....	57
B. Implikasi Kajian dan Saran yang Dimungkinkan .....	59
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>60</b>
<b>BIBLIOGRAFI.....</b>	<b>93</b>
<b>BIOGRAFI PENULIS .....</b>	<b>99</b>

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 3.1</b>	Rincian Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner.....	33
<b>Tabel 3.2</b>	Profil Responden.....	34
<b>Tabel 3.3.</b>	Hasil Pengujian Validitas Instrumen.....	36
<b>Tabel 3.4.</b>	Hasil Pengujian Reliabilitas.....	36
<b>Tabel 3.5.</b>	Deskripsi Variabel Kajian .....	38
<b>Tabel 4.1.</b>	Hasil Pengujian Multikolinieritas Model I .....	42
<b>Tabel 4.2.</b>	Hasil Pengujian Multikolinieritas Model II .....	42
<b>Tabel 4.3.</b>	Pengujian Heteroskedastisitas Model I.....	43
<b>Tabel 4.4.</b>	Pengujian Heteroskedastisitas Model II .....	43
<b>Tabel 4.5.</b>	Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda Model I.....	47
<b>Tabel 4.6.</b>	Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda Model II.....	47



## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar 2.1.</b>	Model Kajian .....	29
<b>Gambar 4.1.</b>	Histogram Pengujian Normalitas Data Model I.....	44
<b>Gambar 4.2.</b>	Grafik Normal Probability Plot.....	45
<b>Gambar 4.3.</b>	Histogram Pengujian Normalitas Data Model II .....	45
<b>Gambar 4.4.</b>	Grafik Normal Probability Plot .....	46



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di Indonesia, permasalahan akuntabilitas publik menjadi urgen sejak penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu sejak Januari 2001. Satu di antara tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiscal adalah menciptakan *good governance*, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik, yang ditandai transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi, efisiensi dan efektivitas, serta penegakan hukum. Otonomi daerah berdampak pada berbagai aspek; politik, hukum, dan sosial, maupun aspek akuntansi dan manajemen keuangan daerah. Reformasi akuntansi keuangan daerah dan manajemen keuangan daerah, lantas banyak dilakukan dalam rangka memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan publik.

Sumarlin (2004) mengatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggara negara tak lepas dari masalah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Keuangan Negara, karena aspek keuangan negara menduduki posisi strategis dalam proses pembangunan bangsa, dari segi sifat, jumlah maupun pengaruhnya terhadap kemajuan, ketahanan, dan kestabilan perekonomian bangsa, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Menurut UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 31, Gubernur/Bupati/Walikota harus membuat pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Laporan keuangan ini terdiri atas Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Drebin et al (1981) dalam Mardiasmo (2004) mengidentifikasi terdapat sepuluh kelompok pemakai laporan keuangan pemerintah yaitu: (1) pembayar pajak (*tax payer*), (2) pemberi dana bantuan (*grantors*), (3) investor, (4) pengguna jasa (*fee-paying service recipients*), (5) Karyawan/pegawai, (6) pemasok (*vendors*), (7) dewan legislatif, (8) manajemen, (9) pemilih (*voters*), (10) badan pengawas (*oversight bodies*).

Mulyono (2006) menguji secara empiris apakah penyajian neraca daerah dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap upaya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa penyajian neraca daerah maupun aksesibilitas laporan keuangan, keduanya berpengaruh positif secara signifikan terhadap upaya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Nasution (2008) menegaskan bahwa Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tiga tahun terakhir (2004-2006) menunjukkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah semakin memburuk. Karenanya, diperlukan percepatan perbaikan sistem keuangan daerah melalui langkah-langkah konkret, terjadwal dan melibatkan seluruh komunitas akuntabilitas di daerah. Persentase LKPD yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) selama periode 2004-2006 semakin menurun setiap tahunnya. Sebaliknya, LKPD dengan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) dan Tidak Wajar (TW) justru semakin meningkat. Hasil Pemeriksaan atas 459 LKPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2006 menunjukkan bahwa hanya 3 LKPD yang memperoleh opini WTP dan masih ada enam LKPD yang belum disampaikan ke BPK RI sampai akhir 2007.



2005  
15  
10  
5  
0

■ Factory A ■ Factory B ■ Factory C

20

15

10

5

0

15  
10  
5  
0

2005  
2006

## **BAB II**

# **GOOD GOVERNANCE, AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH, PENYAJIAN NERACA, AKSESIBILITAS, DAN TINGKAT PENGUNGKAPAN**

### **A. Good Governance, Akuntabilitas, dan Transparansi**

#### **1. Memahami *Good Governance***

Bank Dunia mendefinisikan *governance* sebagai cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat. Sedangkan, *United Nation Development Program* (UNDP) lebih memfokuskan pada cara pengelolaan negara dengan mempertimbangkan aspek politik yang mengacu pada proses pembuatan kebijakan; aspek ekonomi yang mengacu pada proses pembuatan keputusan yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, serta peningkatan kualitas hidup; dan yang terakhir aspek administratif yang mengacu pada sistem implementasi kebijakan (Mardiasmo, 2006).

Berdasarkan definisi tersebut UNDP mengemukakan 9 karakteristik prinsip-prinsip *Good Governance* yang saling mengait sebagai berikut: (1). Partisipasi (*Participation*), setiap warga mempunyai hak suara dalam pembuatan keputusan; (2). Taat Hukum (*Rule of Law*), hukum keadilan dilaksanakan tanpa pandang bulu; (3). Transparansi (*Transparancy*), kebebasan informasi untuk dipahami dan dimonitor; (4). Responsif (*Responsiveness*), lembaga-lembaga berusaha melayani setiap stakeholdersnya dan responsif terhadap aspirasi masyarakat; (5).

Berorientasi pada Kesepakatan (*Consensus Orientation*), menjadi perantara terhadap kepentingan yang berbeda untuk mendapatkan pilihan terbaik bagi kepentingan bersama; (6). Kesetaraan (*Equity*), semua warga mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan kesejahteraan; (7). Efektif dan Efisien (*Effectiveness and Efficiency*), proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber sebaik mungkin; (8). Akuntabilitas (*Accountability*), pemerintah, swasta, masyarakat, bertanggung jawab kepada publik dan lembaga *stakeholders*; (9). Visi Stratejik (*Strategic Vision*), pemimpin dan publik mempunyai perspektif *Good Governance* yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan yang diperlukan untuk pembangunan.

## 2. Akuntabilitas, Apa Itu?

Menurut Mardiasmo (2004) Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung-jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung-jawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu: (1) pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal), dan (2) pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (akuntabilitas horisontal).

Budiardjo (2000) mendefinisikan akuntabilitas sebagai “pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu.” Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi (*checks and balances system*). Lembaga pemerintahan yang dimaksud adalah

eksekutif (presiden, wakil presiden, dan kabinetnya), yudikatif (MA dan sistem peradilan) serta legislatif (MPR dan DPR). Peranan pers yang semakin penting dalam fungsi pengawasan ini menempatkannya sebagai pilar keempat.

Teori agensi ilmu ekonomi memprediksikan dan menjelaskan perilaku bagian yang terlibat dalam sebuah perusahaan. Secara hukum seorang agen adalah seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain. Teori agensi ilmu ekonomi dibangun di atas konsep legal dari agensi. Teori agensi memandang perusahaan sebagai sebuah persimpangan hubungan keagenan dan mencoba memahami perilaku organisasi dengan menguji bagaimana bagian-bagian pada hubungan keagenan dalam perusahaan memaksimalkan manfaat untuk masing-masing. Teori agensi memosisikan konflik antara manajemen dan pemilik dapat diredukan dengan pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan yang rutin adalah satu cara pemilik memonitor kontraknya dengan manajemen (Wolk, 2004).

Mulgan (2000), meneliti dan membandingkan bagaimana fungsi akuntabilitas dalam sektor publik dan swasta/privat. Ternyata sektor publik di Australia lebih mempunyai akuntabilitas yang kuat dibandingkan sektor swasta/privat. Hal ini disebabkan sektor publik lebih mempunyai pengendalian dan akuntabilitas melalui pemerintah dan parlemen sedangkan sektor swasta/privat hanya melakukan pertanggungjawaban kepada komisaris perusahaan Padahal sektor publik dalam hal ini pemerintah kadang melakukan kontrak – kontrak pekerjaan dengan pihak swasta/privat. Tindakan kontrak ini kemudian memicu keinginan masyarakat untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi dalam sektor swasta/privat.

Menurut Wisnu (2007) persepsi adanya akuntabilitas keuangan pada laporan keuangan dipengaruhi oleh kriteria-kriteria sebagai berikut: (1). Laporan keuangan daerah adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana



# **BAB III**

## **MENGKAJI BERAGAM VARIABEL AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

### **A. Snapshot Responden Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Data kajian diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada *stakeholder* laporan keuangan pemerintah antara lain anggota DPRD, guru/dosen, pembayar pajak/masyarakat umum dan LSM. Kuesioner diberikan dengan mengantar langsung dan dititipkan kepada staf di kantor, dengan mengadakan perjanjian pengambilannya. Kuesioner kemudian diambil setelah waktu yang dijanjikan tiba. Waktu yang diperlukan untuk pengumpulan data selama 2 minggu dimulai dari 1 Maret 2009 sampai dengan 30 April 2009. Berikut ini ringkasan penyebaran dan penerimaan kuesioner:

**Tabel 3.1 Rincian Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner**

Total pengiriman kuesioner	200
Kuesioner yang kembali	123
③ Kuesioner yang tidak dapat digunakan (tidak lengkap)	6
③ Kuesioner yang dapat digunakan	
Total Kuesioner yang digunakan	117
Tingkat pengembalian ( <i>response rate</i> ) (117/200) * 100	58,5%

*Sumber: Data primer diolah, 2009*

Berdasarkan hasil kajian, maka dapat dideskripsikan profil responden dalam table ini:

**Tabel 3.2 Profil Responden**

No.	Profil	Frekuensi	%
1.	Umur		
	③ ≤ 30 tahun	3	2,6
	③ 31 – 40 tahun	39	33,3
	③ 41 – 50 tahun	59	50,4
	③ 51 – 60 tahun	14	12,0
	③ > 60 tahun	2	1,7
	<b>Jumlah</b>	<b>117</b>	<b>100</b>
2.	Pendidikan terakhir		
	③ SMA	5	4,3
	③ D3	2	1,7
	③ S1	88	75,2
	③ S2	22	18,8
	<b>Jumlah</b>	<b>117</b>	<b>100</b>
No.	Profil	Frekuensi	%
3.	Jenis Kelamin		
	③ Laki-laki	68	58,1
	③ Perempuan	49	41,9
	<b>Jumlah</b>	<b>117</b>	<b>100</b>
4.	Status		
	③ Belum menikah	6	5,1
	③ Menikah	110	94,0
	③ Duda	1	0,9
	<b>Jumlah</b>	<b>117</b>	<b>100</b>
5.	Pekerjaan		
	③ Anggota DPRD	21	17,9
	③ Pegawai Negeri Sipil (PNS)	57	48,7
	③ Dosen	20	17,1
	③ Pegawai swasta	19	16,2
	<b>Jumlah</b>	<b>117</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer diolah, 2009



# **BAB IV**

## **AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI**

### **TATA KELOLA PEMERINTAHAN**

### **DAERAH SEBAGAI UPAYA**

### **MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE**

#### **A. Multikolinieritas, Heteroskedastisitas, dan Autokorelasi**

Agar tidak terjadi bias dalam estimasi parameter yang diuji dalam kajian buku ini, maka sebelum dilakukan pengujian postulat dilakukan pengujian asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik dalam kajian ini meliputi multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Model yang baik adalah yang terbebas dari multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.

Model dalam riset ada dua, yaitu pengaruh penyajian neraca daerah, aksesibilitas laporan keuangan, dan tingkat pengungkapan terhadap transparansi keuangan daerah sebagai model I, dan pengaruh penyajian neraca daerah, aksesibilitas laporan keuangan, dan tingkat pengungkapan terhadap akuntabilitas keuangan daerah sebagai model II.

##### **1. Pengujian Multikolinieritas**

Pada model I, hasil pengujian didapatkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,435, sehingga nilai koefisien determinasi tidak besar ( $< 0,7$ ). Selain hal tersebut, maka didapatkan nilai VIF untuk variabel penyajian neraca daerah, aksesibilitas laporan keuangan, dan tingkat pengungkapan kurang dari 10. Berdasarkan hal tersebut, maka disimpulkan bahwa dalam model I tidak terdapat multikolinieritas. Hasil pengujian multikolinieritas untuk model I dapat dideskripsikan dalam tabel 4.1.

**Tabel 4.1. Hasil Pengujian Multikolinieritas Model I**

<b>Model</b>	<b>t</b>	<b>p</b>	<b>R<sup>2</sup></b>	<b>VIF</b>	<b>Keterangan</b>
Konstan	0,270	0,788	0,435		Tidak terjadi Multikolinieritas
PND	2,649	0,009		1,130	
ALK	6,568	0,000		1,201	
TP.	1,729	0,087		1,141	

Sumber: Data Primer diolah, 2009

Pada model II, hasil pengujian didapatkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,185, sehingga nilai koefisien determinasi tidak besar ( $< 0,7$ ). Selain hal tersebut, maka didapatkan nilai VIF untuk variabel penyajian neraca daerah, aksesibilitas laporan keuangan, dan tingkat pengungkapan kurang dari 10. Berdasarkan hal tersebut, maka disimpulkan bahwa dalam model II tidak terdapat multikolinieritas. Hasil pengujian multikolinieritas dapat dideskripsikan dalam tabel 4.2.

**Tabel 4.2. Hasil Pengujian Multikolinieritas Model II**

<b>Model</b>	<b>t</b>	<b>p</b>	<b>R<sup>2</sup></b>	<b>VIF</b>	<b>Keterangan</b>
Konstan	5,259	0,000	0,185		Tidak terjadi Multikolinieritas
PND	2,781	0,006		1,130	
ALK	3,362	0,001		1,201	
TP	- 1,517	0,132		1,141	

Sumber: Data primer diolah, 2009

## 2. Pengujian Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan menggunakan korelasi *spearman rank*, dengan cara mengkorelasikan nilai residual mutlak dengan variabel bebas. Hasil pengujian heteroskedastisitas pada model I menunjukkan bahwa nilai p untuk koefisien regresi semua model kajian yang diuji lebih dari



# **BAB V**

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Penyajian neraca daerah berpengaruh secara positif signifikan terhadap transparansi keuangan daerah. Hasil ini mengindikasikan bahwa pengguna laporan keuangan daerah akan merasa bahwa laporan keuangan daerah mempunyai transparansi yang tinggi apabila penyajian neraca daerah dideskripsikan secara lengkap. Hasil kajian ini mendukung hasil riset Mulyono (2006) yang menunjukkan bahwa penyajian neraca daerah berpengaruh positif terhadap upaya transparansi keuangan daerah.

Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh secara positif signifikan terhadap transparansi keuangan daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa pengguna laporan keuangan daerah mempunyai persepsi bahwa transparansi laporan keuangan daerah akan terpenuhi apabila laporan keuangan tersebut mempunyai aksesibilitas yang tinggi. Hasil kajian ini mendukung hasil riset Mulyono (2006) yang menunjukkan bahwa penyajian neraca daerah berpengaruh positif terhadap upaya transparansi keuangan daerah.

Tingkat pengungkapan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap transparansi keuangan daerah. Tidak signifikannya variabel tingkat pengungkapan kemungkinan disebabkan pengguna laporan keuangan daerah belum menganggap bahwa tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah yang lengkap termasuk informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target termasuk kendalanya, dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi, dan informasi tambahan lain, diperlukan dalam transparansi keuangan daerah.

Penyajian neraca daerah berpengaruh secara positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa laporan keuangan daerah dianggap akuntabel apabila memberikan informasi secara terintegrasi mengenai posisi asset, utang dan ekuitas dana pemda, serta memberikan informasi mengenai dampak pelaksanaan anggaran. Hasil kajian ini mendukung riset Mulyono (2006) yang menunjukkan penyajian neraca daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap upaya transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh secara positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Hal ini menunjukkan pentingnya penerapan akuntansi keuangan yang baik dan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi tersebut dalam mempengaruhi tingkat akuntabilitas keuangan daerah. Hal ini memperkuat pendapat Jones et al (1995) dalam Mulyono (2006), yang menyatakan bahwa ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas, tidak disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial.

Tingkat pengungkapan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa pengguna laporan keuangan daerah mempunyai persepsi bahwa tingkat akuntabilitas suatu laporan keuangan tidak tergantung dari tingkat pengungkapan yang lengkap termasuk informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target termasuk kendalanya, dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi, dan informasi tambahan lain.

Penyajian neraca daerah, aksesibilitas laporan keuangan, dan tingkat pengungkapan secara bersama-sama berpengaruh secara positif signifikan terhadap transparansi keuangan daerah.



## BIBLIOGRAFI

- Algifari, 2000. *Analisis Regresi Teori Kasus dan Solusi*. BPFE, Yogyakarta
- Budiardjo, M. 2000. *Menggapai Kedaulatan untuk Rakyat*. Mizan, Bandung
- Dwiningsih, S. 2006. *Persepsi Stakeholder Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*, Tesis S2, Magister Akuntansi UGM (tidak dipublikasikan) Yogyakarta.
- Ghozali, 2002. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Gujarati, Damodar N. 2003. *Basic Econometrics*, McGraw-Hill Internatinal Editions.
- Hair, J.F., R.E. Anderson., R.L. Tatham, and W.C. Black. 1998. *Multivariate data Analysis*. Prentice Hall, Fourth edition
- Hakim, R. dan Halim, A. 2008. "Penginvestigasian Audit Expectation Gap Pada Sektor Publik". *SNA XI*. Pontianak
- Kadarmi, T. 2008. *Penyajian Neraca SKPD dan Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD*, Skripsi S1, FEB UGM (tidak dipublikasikan) Yogyakarta
- Kearns, P. Kevin. 1994, *Accountability and Entrepreneurial Public Management: The Case of the Orange County Investment Fund*, California.

- Kuncoro, M. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Penerbit Erlangga, Jakarta
- Mahsun, M. Sulistiyowati, F. dan Andre Purwanugraha, H. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. BPFE, Yogyakarta
- Mardiasmo, 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi, Yogyakarta
- Mardiasmo, 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana *Good Governance*. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol. 2 No. 1, Mei:1-17
- Mulgan, Richard. 1997, *The Processes of Public Accountability*, Journal of Public Administration.
- Mulgan, Richard. 2000, *Comparing Accountability in the Public and Private Sectors*, Journal of Public Administration.
- Mulyono, B. 2006. *Pengaruh Penyajian Neraca daerah dan Aksebilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*, Tesis S2, Magister Akuntansi UGM (tidak dipublikasikan) Yogyakarta.
- Nasution, A. 2008. *Membangun Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Upaya Peningkatan Kemampuan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat*, <http://www.bpkp.go.id/>
- Novita, M. dan Chaerul D. Djakman. 2008, *Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (CSR Disclosure) Pada Laporan Tahunan Perusahaan: Studi Empiris Pada Perusahaan Publik Yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Tahun 2006*, *SNA XI*, Pontianak
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Eavaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah*

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi LPPD kepada Masyarakat.*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*

Sekaran, U. 2003. *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. John Wiley & Sons Inc., New York.

Sugiyono, 2004. *Statistika untuk Penelitian*. Alfabeta, Bandung

Sumarlin, 2004. Good Governance Mensyaratkan Pengawasan Internal dan Eksternal, *Seminar Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntansi Sektor Publik*, di Hotel Borobudur, Jakarta, 13 Januari 2004

Sumodiningrat, G, 2002, *Ekonometrika Pengantar*, edisi 2003/2004, cetakan ketujuh, BPFE, Yogyakarta.

Wisnu, H.S., 2007. *Persepsi Stakeholder Terhadap Kriteria Akuntabilitas Keuangan dan Transparansi Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Tesis S2, Magister Akuntansi UGM (tidak dipublikasikan) Yogyakarta.

Wolk, H. Dodd, J. and Tearney, M. 2004. *Accounting Theory*. Sixth Edition, South Western.



## BIOGRAFI PENULIS



**Dr. Sukhemti, S.E., M.Sc.**, lahir desa Kertasinduyasa, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Ia adalah analis tata kelola keuangan sektor publik dan Dosen di Universitas PGRI Yogyakarta (UPY). Riwayat Pendidikan Sarjana (S.E) diperolehnya di STIE Widya Wiwaha Yogyakarta, tahun 1994-1998, bidang Ilmu Akuntansi. Melanjutkan ke jenjang S2 di Universitas Gadjah Mada (UGM), tahun 2007-2009, bidang Ilmu Akuntansi (M.Sc.). Melanjutkan jenjang Studi Doktoral (Dr.) di Universitas Islam Indonesia (UII), Bidang Ilmu Akuntansi, tahun 2018-2025. Selain aktif mengajar penulis menjabat wakil rektor bidang II periode 2021-2025 di Universitas PGRI Yogyakarta (UPY). Beragam karya telah dipublikasikan penulis di jurnal-jurnal ilmiah dan aktif memberikan pelatihan perihal tata kelola keuangan di sektor publik.